

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah cerminan atas kondisi keuangan serta kinerja operasional suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan keuangan bukan hanya dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan, tetapi juga menjadi acuan penting untuk pemangku kepentingan eksternal misalnya kreditor, regulator, investor, serta masyarakat umum dalam menilai kesehatan finansial serta prospek bisnis perusahaan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang valid karena fatal akibatnya jika data dimanipulasi. Hal ini dikarenakan informasi keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi akan dimanfaatkan oleh pihak internal ataupun eksternal menjadi dasar utama dalam proses perumusan keputusan yang strategis (Musmini, dkk, 2024). Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun dalam format yang sistematis, disesuaikan dari aturan umum prinsip akuntansi, serta memberikan informasi data yang dapat dibandingkan, andal, relevan, serta dapat dipahami (Kuntadi dan Putri, 2023). Penyusunan yang baik dan benar berarti bahwa seluruh informasi yang disajikan telah melalui proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang akurat serta transparan. Tetapi, meskipun standar pelaporan telah ditetapkan secara jelas, tidak semua perusahaan mampu menjaga kualitas dan integritas laporan keuangannya.

Setiap perusahaan, baik berskala kecil maupun besar, selalu menghadapi risiko terjadinya kecurangan. Perusahaan yang resmi tidak menjamin perusahaan

tersebut adalah perusahaan yang bersih. Menurut Alim, dkk (2025), dibandingkan dari perusahaan yang belum terdata dalam pasar saham, risiko terjadinya praktik kecurangan menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi pada perusahaan yang telah *go public*. Kecurangan yang biasa terjadi pada perusahaan yaitu kecurangan laporan keuangan. Keputusan ekonomi yang diambil oleh investor maupun pihak-pihak berkepentingan sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber informasi utamanya. (Syafitri, dkk, 2021), sehingga keandalan dan integritas laporan tersebut sangatlah penting. Namun demikian, fenomena *fraud* atau kecurangan laporan keuangan masih terus terjadi dan berdampak merugikan banyak pihak. Menurut Masdiantini, dkk (2022), tindakan manipulasi atas laporan keuangan dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang sengaja disajikan secara bias guna menyesatkan pengguna laporan demi memenuhi kepentingan oknum tertentu. Kecurangan laporan keuangan pada dasarnya adalah bentuk manipulasi data keuangan secara sadar yang ditujukan untuk mengelabui investor, penyedia kredit, maupun pemangku kepentingan lainnya. (Arum, dkk, 2023).

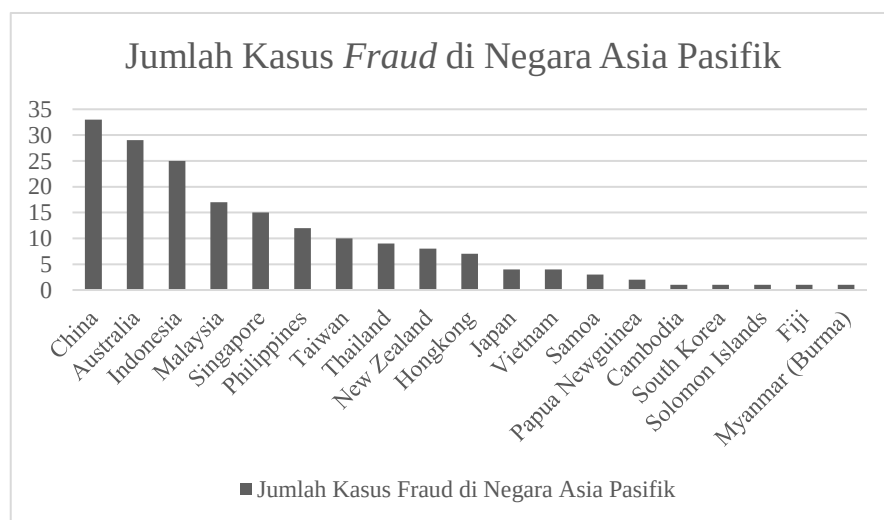
Tabel A.1
Perbandingan Jumlah Kerugian akibat *Fraud*

Jenis <i>Fraud</i>	2022	2024
	Kerugian	
Kecurangan Laporan Keuangan	\$593.000	\$766.000
Korupsi	\$150.000	\$200.000
Penyalahgunaan Aset	\$100.000	\$120.000

(Sumber: ACFE, 2022 & 2024)

Skema kecurangan pada tabel A. 1 di atas mengacu pada klasifikasi pohon kecurangan (*fraud tree*). Kecurangan laporan keuangan tercatat sebagai jenis *fraud* dengan kerugian terbesar dengan *median loss* sebesar \$ (USD) 766.000 per kasus

dimana terjadi peningkatan sebesar \$ (USD) 173.000 dari tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan memberikan dampak keuangan yang jauh lebih besar dibandingkan jenis kecurangan lainnya, sehingga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan perusahaan.



Gambar A.1
Perbandingan Jumlah Kasus *Fraud* di Wilayah Asia-Pasifik
(Sumber: ACFE, 2024)

Selanjutnya dalam publikasi ACFE tahun 2024 yang terlihat pada gambar A.1 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 3 (tiga) di kawasan Asia-Pasifik sebagai negara dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak, yaitu dari total 183 kasus terdapat 25 kasus. Posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan 33 kasus, disusul Australia dengan 29 kasus. Tingginya frekuensi temuan *fraud* tersebut memberikan gambaran bahwa kecurangan merupakan ancaman serius bagi stabilitas bisnis serta kepercayaan publik di Indonesia. Risiko kecurangan di Indonesia menjadi sinyal penting bagi regulator dan perusahaan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas bisnisnya.

Lebih rinci berdasarkan tipe industri, publikasi data ACFE 2024, industri manufaktur menduduki peringkat 2 (dua) dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak secara global, yakni sebanyak 175 kasus. Meskipun dari sisi jumlah kasus di sektor manufaktur berada di bawah industri perbankan, namun *median loss* akibat *fraud* pada sektor manufaktur lebih tinggi yakni \$ (USD) 267.000 atau melampaui dari dua kali lipat dibanding sektor perbankan yang hanya sebesar \$ (USD) 120.000. Fakta ini mengindikasikan bahwa kasus *fraud* di sektor manufaktur cenderung lebih merugikan dalam hal finansial. Selain itu, menurut Solikhin dan Prasetya (2023) perusahaan manufaktur memiliki prosedur bisnis dan prosedur akuntansi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan sektor lainnya, sehingga rawan terjadi kecurangan.

Dasar penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan khususnya pada perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor barang konsumsi, yang tidak terpengaruh oleh siklus ekonomi. Sektor *consumer non-cyclicals* adalah kelompok perusahaan yang berperan di bidang produk dan jasa kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, farmasi, dan produk rumah tangga, yang permintaannya cenderung stabil meskipun daya beli menurun dan kondisi ekonomi mengalami fluktuasi (Nadya, 2023). Sifat stabilitas dan permintaan yang konsisten membuat sektor ini menjadi sumber data yang relevan karena dapat memberikan gambaran yang jelas dalam mengamati kecurangan laporan keuangan. Sektor ini berisi industri yang menyediakan barang dan jasa esensial yang selalu dibutuhkan masyarakat sepanjang waktu serta terdiri dari perusahaan-perusahaan industri yang dikenal luas oleh masyarakat dan sangat terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, bisa dengan mudah menganalisis pertumbuhan sektornya. Besarnya

jumlah penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 284,4 juta jiwa pada pertengahan 2025 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik, ditambah dengan pola konsumsi masyarakat yang tinggi, memberikan kesan bahwa perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals* merupakan perusahaan yang menjamin sebuah stabilitas dalam hal keuntungan.

Prospek bisnis yang cerah menjadi daya tarik utama dari sektor *consumer non-cyclicals* yang ada di Indonesia, tercermin pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat adanya kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita bulanan sebesar 4,57% per Maret 2025. Peningkatan daya beli ini mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat terhadap produk kebutuhan pokok terus bertumbuh. Namun, tingginya permintaan tersebut sering kali tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan lokal, sehingga membuka peluang bagi perusahaan asing untuk masuk dan bersaing pada pasar domestik. Persaingan yang semakin keras ini berisiko mendorong sejumlah perusahaan lokal untuk menempuh berbagai cara termasuk pelaporan keuangan yang curang demi mempertahankan kelangsungan usaha dan daya saing.

Terdapat kasus manipulasi terhadap laporan keuangan di sektor *consumer non-cyclicals*, yaitu pada sektor *consumer non-cyclicals* terlihat pada kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang berubah nama pada tahun 2021 menjadi PT FKS Food Sejahtera Tbk (AISA). Berdasarkan laporan hasil investigasi oleh Ernst & Young (EY) yang diberitakan oleh Abidin (2019), perusahaan ini diindikasikan adanya penggelembungan dengan melebihkan (*overstatement*) pada berbagai pos laporan keuangan perusahaan. Nilai penggelembungan tersebut sangat signifikan, yaitu mencapai sekitar Rp 4 triliun yang tersebar pada akun piutang usaha, persediaan, serta aset tetap di dalam grup TPSF. Selain itu, ditemukan pula *overstatement* pada

sisi kinerja pendapatan, di mana penjualan dilaporkan lebih tinggi sebesar Rp 662 miliar dibanding kondisi yang sebenarnya. Tidak hanya itu, EBITDA entitas Food juga dilebihkan sebesar Rp 329 miliar, sehingga kinerja operasional perusahaan tampak lebih baik dari realita. Berdasarkan contoh kasus diatas menjadi sebuah bukti akan manipulasi terhadap laporan keuangan khususnya di sektor *consumer non-cyclicals* pernah terjadi.

Fenomena kecurangan ini berakar pada konflik kepentingan yang dijabarkan dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan mengemukakan adanya kontrak antara satu atau lebih prinsipal dan agen, di mana agen tersebut diwajibkan untuk melaksanakan aktivitas yang selaras dengan kepentingan prinsipal, seperti mengambil keputusan tertentu atau menjalankan wewenang yang didelegasikan. (Jensen & Meckling dalam syafitri, dkk, 2021). Teori ini mengemukakan bahwa agen mempunyai perilaku *self-interest* (mementingkan dirinya) yang akan bertentangan dengan keinginan prinsipal (Ghozali, 2020). Adanya potensi masalah yang timbul dari perilaku antara pihak pemilik perusahaan (prinsipal) dan pihak pengelola (agen atau manajemen) dapat menyebabkan konflik yang pada akhirnya dapat menyebabkan tindakan dan praktik kecurangan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penelitian terdahulu menurut Fitriani (2024); Syafitri, dkk (2021); Amri dan Puttri (2024) juga menggunakan teori keagenan dalam menjelaskan fenomena ini.

Kecurangan seperti ini umumnya memberikan dampak kerugian yang lebih besar ketika dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab utama di dalam perusahaan. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui penerapan tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya *fraud*. Tata kelola perusahaan adalah serangkaian mekanisme, proses, dan hubungan yang menjadi sarana pengendalian dan pengelolaan perusahaan. Struktur dan prinsip tata kelola menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, serta mencakup aturan dan prosedur pengambilan keputusan perusahaan (Ghozali, 2020). Tata kelola perusahaan sangat dibutuhkan karena mampu menyelaraskan kepentingan dari prinsipal dan agen, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Tata kelola perusahaan yang lemah bisa membuka peluang terjadinya kecurangan, sedangkan tata kelola yang baik berperan penting dalam mencegah praktik manipulasi laporan keuangan. Salah satu elemen utama dalam tata kelola perusahaan yaitu efektivitas sistem pengendalian internal. Laporan ACFE tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari separuh kasus kecurangan di tempat kerja terjadi karena kelemahan dalam pengendalian internal, yaitu 32% disebabkan oleh ketiadaan kontrol internal dan 19% karena pelanggaran terhadap kontrol yang sudah ada. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal merupakan aspek penting untuk meminimalisasi risiko kecurangan laporan keuangan.

Tabel A.2
Departemen dengan frekuensi *fraud* tertinggi

<i>Level</i>	2022	2024
	<i>Median Loss</i>	
<i>Owner</i>	USD 500.000	USD 500.000
Manajer	USD 100.000	USD 184.000
<i>Employee</i>	USD 50.000	USD 60.000

(Sumber ACFE 2022 & 2024)

Tabel A.2 di atas mengungkapkan bahwa median kerugian (*median loss*) akibat *fraud* secara keseluruhan mencapai USD 500.000, dan jika dilihat dari sisi pelakunya paling sering terjadi pada level pemilik atau manajemen puncak (*owner*). Hal ini menegaskan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam perusahaan dapat menimbulkan dampak finansial yang cukup besar. Fakta ini memperlihatkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan guna memperkuat sistem pengawasan dalam memastikan manajemen puncak tetap selaras dengan tujuan perusahaan.

Menurut survei yang diselenggarakan oleh *The Asian Corporate Governance Association* (ACGA) serta *CLSA Limited* (CLSA) yang dipublikasikan dalam 11th biennial *CG Watch 2023* yang menyajikan penilaian menyeluruh terhadap praktik tata kelola perusahaan dan ESG di 12 pasar Asia-Pasifik. Dalam survei tersebut disebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat terakhir yakni peringkat 12 dari dua belas negara yang dilakukan survei sejalan. Negara ini jauh tertinggal di belakang negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang masing-masing menempati peringkat ketiga dan kelima. Posisi Indonesia dalam kinerja tata kelola menurut survei ini bahkan tidak berubah bila dibandingkan tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat masalah pada tata kelola perusahaan di Indonesia, di mana pada gilirannya akan memunculkan risiko terjadinya kecurangan.

Penelitian terdahulu mengenai kecurangan laporan keuangan yang menggunakan tata kelola perusahaan sebagai variabel independen terus menghasilkan temuan yang bertentangan dan tidak konsisten. Dari kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik penelitian mengenai tata kelola

perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada variabel tata kelola perusahaan sebagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan yang meliputi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2017, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Mereka diangkat melalui keputusan rapat pemegang saham dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Keberadaan Dewan Komisaris independen merupakan mekanisme mendasar untuk mencegah praktik kecurangan, karena mereka dapat menilai kebijakan dan keputusan manajemen secara lebih netral. Namun, efektivitas pengawasan dewan komisaris independen masih sering diragukan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2024); Septiani dan Yuyetta (2025) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan artinya, semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan. Akan tetapi, penelitian oleh Widowati dan Oktoriza (2021); Candra, dkk (2024); Amri dan Putri (2024) menemukan bahwa keberadaan komisaris indepenen tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan keahlian, kurangnya keterlibatan aktif dalam proses pengawasan, atau lemahnya posisi mereka dalam memengaruhi keputusan manajemen.

Komite audit berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi, serta dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan Dwianto, dkk (2024). Selain itu, komite audit juga bertindak sebagai penghubung antara manajemen dan auditor eksternal, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan transparansi serta kualitas informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Komite audit diharapkan mampu meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan dikarenakan adanya fungsi pengawasan dan koordinasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Rainingtyas, dkk (2021) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang efektif berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, artinya semakin kuat peran komite audit maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat hasil penelitian lain oleh Syafitri, dkk (2021); Septiani dan Yuyetta (2025) yang menunjukkan peran komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan institusional dilihat dari kepemilikan saham oleh entitas seperti perusahaan investasi, dana pensiun, ataupun bank. Ketika pihak eksternal memiliki saham di suatu perusahaan, mereka secara alami menjalankan pengendalian dan pengawasan atas investasi mereka, sehingga berpotensi membatasi tindakan manajemen (Syafitri, dkk, 2021). Tingginya tingkat kepemilikan institusional diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap operator, mengingat institusi-institusi tersebut memiliki kepentingan yang signifikan terhadap keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan pemegang saham institusional berfungsi untuk pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, sehingga peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraisyah dan Setiawati (2024); Harris dan Murtanto (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian oleh Marlinda dan Sari (2024); Syafitri, dkk (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial mengacu pada porsi saham yang dipegang oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial yang berlebihan dapat memberikan kendali yang lebih besar kepada manajemen atas aktivitas perusahaan. Situasi ini dapat bermula dari pola pikir manajerial yang oportunistik (Syafitri, dkk, 2021). Dominasi manajemen ini berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dari pihak luar, seperti dewan komisaris independen maupun pemegang saham minoritas. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa meningkatkan peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan, karena manajemen memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengambil keputusan dan menyusun laporan keuangan tanpa pengawasan yang ketat. Penelitian oleh Amri dan Putri (2024); Mahandari, dkk (2024) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun penelitian oleh Nuraisyah dan Setiawati (2024) menyatakan berpengaruh negatif, sedangkan penelitian oleh Candra, dkk (2024); Widowati dan Oktoriza (2021); Syafitri, dkk (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Variabel kecurangan laporan keuangan pada penelitian ini akan memakai model pendeteksi kecurangan yang dimunculkan oleh Professor Messod Daniel Beneish yaitu Beneish M-Score. Dipilihnya Beneish M-Score dalam penelitian ini karena model ini dirancang khusus untuk mendeteksi adanya manipulasi laporan

keuangan melalui analisis rasio keuangan. Model ini terdiri dari delapan variabel Beneish (1999), yaitu Rasio Hari Penjualan Piutang (DSRI), Rasio Margin Laba Kotor (GMI), Rasio Kualitas Aset (AQI), Rasio Pertumbuhan Penjualan (SGI), Rasio Depresiasi (DEPI), Rasio Beban Penjualan dan Administrasi Terhadap Penjualan (SGAI), Rasio *Leverage* (LVGI), Rasio Total AkruaI Terhadap Total Aset (TATA). Seluruh hasil dari variabel tersebut akan dikalkulasikan dengan rumus *M-Score* untuk mendapatkan nilai akhir yang akan menentukan apakah sebuah perusahaan terindikasi *fraud* atau *non fraud*. Penelitian ini memilih model Beneish M-Score dibandingkan model pendeteksian lain, seperti Dechow F-Score, karena model Beneish memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dan tipe kesalahan yang lebih rendah. Variabel spesifik dalam M-Score, seperti *Gross Margin Index* dan *Sales Growth Index*, dirancang khusus untuk menangkap anomali pada persediaan dan penjualan yang menjadi karakteristik utama sektor manufaktur *Consumer Non-Cyclicals*. Pemilihan ini sejalan dengan penelitian (Luthfiyyah, dkk, 2024) yang menerapkan Beneish M-Score pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi primer. Pendapat ini diperkuat oleh (Andriadi, 2025) yang juga menekankan bahwa penggunaan model Beneish M-Score dinilai lebih representatif karena data yang dibutuhkan dalam perhitungannya cenderung lebih tersedia dan mudah diakses dibandingkan model pendeteksian lainnya seperti F-Score.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Tahun 2022-2024”

1.2 Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai mengenali persoalan yang sedang dikaji. Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Laporan keuangan memiliki standar yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Namun, masih ada perusahaan di Indonesia yang tidak mampu menjaga kualitas dan integritas laporan keuangannya.
2. Adanya kasus kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, khususnya sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia yang berpotensi merugikan investor dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Hasil penelitian terdahulu mengenai kecurangan laporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan studi dan kajian lebih lanjut.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diterapkan, dengan demikian kajian studi ini akan berfokus pada permasalahan variabel dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial serta pengaruhnya terhadap kecurangan laporan keuangan studi pada perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals* di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap

kecurangan laporan keuangan?

2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Menguji pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sumbangan pengetahuan di bidang akuntansi keuangan khususnya terkait tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap kecurangan laporan

keuangan pada perusahaan manufaktur di sektor *consumer non-cyclicals* serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara tata kelola perusahaan dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur Indonesia yang beroperasi di sektor tersebut.

2. Manfaat Praktis

a). Bagi Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* di Indonesia

Studi ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi perusahaan manufaktur Indonesia yang bergerak di sektor *consumer non-cyclicals*, dengan tujuan memperkuat tata kelola perusahaan dan sebagaimana telah ditunjukkan untuk meningkatkan citra perusahaan.

b). Bagi Investor

Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi para investor dengan menyoroti kecenderungan perusahaan atau individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan laporan keuangan, oleh karena itu, investor diimbau untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.